

Perayaan Imlek, Ketum MATAKIN : Kedepankan Budaya Malu Jika Ingin Menjadi Negara Besar dan Maju



Susilo Bambang Yudhoyono

DEPOK (IM) - Keluarga besar MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) menggelar malam perayaan tahun baru Imlek 2575 di MAKIN Semangat Genta Rohani (Segar) Cilandong, Jalan Raya Bogor, Cilandong, Depok, Jumat (9/2) malam.

Acara yang diisi dengan malam kebaktian, kesenian, sembahyang tutup tahun dan doa syukur tersebut dihadiri oleh Ketua Umum MATAKIN Xs. Budi S Tanuwibowo, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PBNU KH. Marsudi Syuhud, Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, S.IP, (Ketua Umum PHDI/Parisada Hindu Dharma Indonesia), Pendeta Gomar Gultom (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), Romo Kardinal Ignatius Suharyo (Tokoh Katolik Seluruh Indonesia), Engkus Kuswana (Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia), Tri Eko Sriyanto (Ketua Paguyuban Spiritual Nusantara), Kapolres Depok Kombes Pol Arya Perdana, Danramil 03/Sukmajaya Kapten Infanteri Usman Aswan Siregar, tokoh agama, umat Khonghucu dan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya Budi S Tanuwibowo mengatakan, tema Imlek tahun ini mengingatkan agar mengedepankan budaya malu. Hal ini salah satunya diterapkan Jepang, hingga akhir menjadi negara besar dan maju.

"Ini yang harus kita bangun, memiliki rasa malu yakni malu



Susilo Bambang Yudhoyono dan Xs. Budi S Tanuwibowo berfoto bersama para tokoh agama.



SBY memberikan angpao Imlek ke barongsai.



Kombes Pol Arya Perdana menyambut kedatangan Susilo Bambang Yudhoyono.

mengakui sesuatu yg bukan miliknya," ucapnya.

Kembali Budi menyampaikan bahwa pada hakikatnya malam Imlek merupakan momen dimana berkumpulnya seluruh anggota keluarga dengan menggelar makan bersama.

Ajaran agung dalam salah satu kitab agama Khonghucu lanjut Budi, negara itu terdiri atas

keluarga-keluarga, dimana kalau kondisi setiap keluarga berjalan aman dan damai maka akan

tercipta negara yang aman dan damai.

"Keluarga adalah pokok ko-

koh berdirinya sebuah negara dan tiang utama sebuah negara.

Kalau membangun negara yang penting adalah membangun manusia terutama pribadi dan keluarga. Sebuah negara mustahil berdiri kokoh, jika keluarganya berantakan," imbuhnya.

Kembali Budi menambahkan, membangun pribadi dan keluarga akan menjadi



Xs. Budi S Tanuwibowo dan para tokoh agama membacakan doa bersama.



Susilo Bambang Yudhoyono dan Xs. Budi S Tanuwibowo berfoto bersama pengurus MAKIN Segar.



Susilo Bambang Yudhoyono dan Xs. Budi S Tanuwibowo berfoto bersama panitia acara.

Berbagi Kasih di Tahun Baru Imlek 2024, Perwanti PSMTI Bagikan Paket Sembako ke Warga Kurang Mampu di Tangerang

JAKARTA (IM) - Perwanti PSMTI (Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) Pusat membagikan 160 paket bingkisan dan angpao Imlek kepada lansia dan masyarakat kurang mampu yang merayakan Imlek di wilayah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pelaksanaan pembagian berlangsung di Aula Sebaguna BBC (Bodhisatta Buddhist Center), Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Banten. Selasa (6/2) lalu.

Hadir pada kegiatan tersebut, sejumlah pengurus antara Ketua Pembina Abraham Rudy, Ketua Lisanti Jusuf, Ketua Dewan Penasihat Sufida, Ketua

Sri Mutiara Sutardji, Sekretaris Lusiana Ng, Weng Hualing, Bendahara, Luliana Lukyto, Bidang Kesejahteraan dan Pendidikan Maggie Koesno Ritha Helena bidang Pengembangan Sumber Daya, Helga Tjam Bidang Kesehatan dan Olahraga Olahraga, Anizar Bie bidang Pariwisata dan Budaya dan jajaran pengurus lainnya Gunawan, Duriati Murni, Tong Lirong, Sudarmono, Eddie Tan dan Ricky Lim Suharlim, Rita Chandra

Ketua Harian Perwanti PSMTI Pusat Idayani Oesman mengatakan Perwanti dalam men-



Penyerahan bantuan secara simbolis.

jalankan roda organisasi selalu berpedoman dengan motto yakni Kami Peduli, Kami Berbagi. Oleh karena itu kegiatan pemberian paket sembako ini menjadi

wujud dari motto tersebut.

Menurut Idayani, Perwanti tidak akan berhenti pada pemberian paket sembako namun jika tidak ada hambatan, Perwanti

akan ikut membantu merenovasi sekolah Bodhisatta yang berada di bawah naungan Yayasan Pannadhika Bodhisatta

"Kami sudah beberapa kali mengadakan disini dan kami melihat sekolah di sini butuh sentuhan. Mungkin kedepannya kami akan merenovasi kelas-kelas ini atau menambah kelas-kelas, karena mereka ini hanya sampai SMP dan SMA nya belum ada. Mungkin teman-teman yang mendengar ini dapat bersama-sama untuk membangun sekolah ini," ujar Idayani.

Pada kesempatan ini, Dewan Pembina Perwanti PSMTI Pusat Abraham Rudy mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2575/2024.

"Selamat Tahun Baru Imlek. Di tahun Naga ini semoga kita bisa berbagi kepada masyarakat, semoga semua apa damai sejahtera pekat Tuhan berkatinya semua," ucap Abraham.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pannadhika Bodhisatta BBC Bhante Anando Aggadipo mengucapkan terima kasih kepada Perwanti yang telah memberikan paket sembako dan angpao kepada Masyarakat. Atas kebaikan ini, Bhante Anando berdoa agar pengurus Perwanti selalu diberi Kesehatan. • bam



Abraham Rudy memberikan angpao Imlek ke warga.



Idayani Oesman dan Abraham Rudy berfoto bersama pengurus lainnya.

Apresiasi Tema Imlek Nasional yang Digelar MATAKIN, Wapres : Menggelorakan Semangat Memperbaiki Diri



Menag Yaquq Cholil Qoumas (tengah) memukul tambur pembuka perayaan Imlek Nasional.



Menag Yaquq Cholil Qoumas berfoto bersama Wamenag Saiful R. Dasuki, Kepala Pusbimdik Khonghucu Kemenag Susari, Prof. Jimmy Asshiddiqie, Agus Harimurti Yudhoyono dan isteri, Wakilpolri Komjen Pol. Agus Andrianto, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Ketum MATAKIN Xs. Budi S Tanuwibowo dan jajaran.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi tema yang diangkat dalam perayaan Imlek Nasional 2575 Kongzili yang digelar keluarga besar MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) bekerjasama dengan Pusbimdik (Pusat Bimbingan dan Pendidikan) Khonghucu Kementerian Agama, di Gedung Samudera, Jakarta pada Senin (13/2).

Tema tersebut yakni "Malu bila Tidak Tahu Malu, Menjadikan Orang Tidak Menanggung Malu".

Menurut Wapres tema tersebut menjadi cermin untuk menggelorakan semangat memperbaiki diri di momentum Tahun Baru Imlek.

"Saya kira tema ini sarat makna, baik dalam konteks refleksi hubungan antara individu dengan Tuhannya maupun antar sesama dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Wapres saat memberikan kata sambutan secara daring.

Kembali Wapres menjelaskan rasa malu merupakan sifat fundamental untuk terwujudnya kebaikan sekaligus untuk menciptakan jarak dari keburukan. Seorang yang memiliki rasa malu akan takut melakukan tindakan yang tidak sesuai norma, nilai, dan etika. Dengan demikian, ia tidak akan melakukan perbuatan yang menyakitkan sesamanya.

"Karena itu, seluruh pemuka agama, termasuk pemuka agama Khonghucu, memiliki peran penting dalam membudayakan rasa malu di kalangan umat. Ajaran, nasihat, dan edukasi kepada umat terus diperlukan, agar rasa malu dalam diri individu mampu berkembang menjadi sebuah tata nilai komunal yang mengukuhkan identitas bangsa. Dengan demikian, keteraturan, kerukunan, dan persatuan bangsa ini senantiasa



Wapres Ma'ruf Amin



Menteri Agama Yaquq Cholil Qoumas



Xs. Budi S Tanuwibowo

terpelihara," sambung Wapres. Tahun ini merupakan tahun ke-25 bagi umat Khonghucu dan Masyarakat Tionghoa dapat merayakan Tahun Baru Imlek secara nasional.

Perayaan Imlek Nasional ini dibuka oleh Menteri Agama Yaquq Cholil Qoumas dan dihadiri antara lain Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Kepala Pusbimdik Khonghucu, Kemenag Susari, Ketua Dewan Kehormatan MATAKIN Prof. Dr. H. Jimmy Asshiddiqie, Ketua Umum MATAKIN Xs. Budi S

Tanuwibowo, Agus Harimurti Yudhoyono dan isteri, Wakilpolri Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Harris Chandra, Sekjen Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoa) Candra Jap, Pendiri Perhimpunan INTI Nancy Wijaya, Ketua Umum PINTI dr Metta Agustina, Ulung Rusman, Peneliti Novi Basuki, pemuka agama dan ribuan umat Khonghucu.

Dalam sambutannya, Menag juga ikut mengapresiasi tema yang diangkat dalam perayaan Im-

lek tahun ini. Menurutnya pesan yang disampaikan sangat bagus, mengajak semua orang tahu diri agar kedepan tidak menanggung malu.

"Perayaan imlek selain mengajak kita bahagia juga sebagai ruang refleksi bersama bagi umat manusia terutama bagi umat Khonghucu agar lebih baik ke depan," ujarnya.

Menag mengatakan Kementerian Agama selalu menghormati hari besar keagamaan. Bukan hanya Idul Fitri dan Natal, namun Tahun Baru Imlek pun memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu. Menag menginstruksikan kepada seluruh Jajaran Kemenag turut memasang ornamen khas nuansa Imlek, seperti lampion, bunga Mei Hwa dan sebagainya, pada setiap kantor Kementerian Agama.

Hal senada juga disampaikan

Ketua Umum MATAKIN Xs. Budi S Tanuwibowo, bahwa tema yang diangkat untuk perayaan Imlek Nasional tahun ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa harus senantiasa mawas diri dalam melakukan segala perbuatan, apakah perbuatan tersebut akan membuat malu bagi diri sendiri atau tidak, karena dengan senantiasa mawas diri untuk menghindari perbuatan - perbuatan yang akan membawa malu bagi diri sendiri akan menjadikan kita terhindar dari menanggung malu.

"Kita semua terutama para pason dan para calon wakil rakyat diangkat untuk selalu ingat bahwa semanis-manisnya kekuasaan akan bisa hancur dan bisa saja dibayar dengan ongkos yang mahal persatuan itu sendiri, kalau kita tidak hati-hati. Maka rasa malu harus menjadi rem, karena betapun nikmat kekuasaan yang lebih penting adalah persatuan dan keutuhan bangs aini," terang Budi. • Kris



Candra Jap, Ulung Rusman dan Novi Basuki



Harris Chandra dan Menag Yaquq Cholil Qoumas



Nancy Wijaya, dr Metta Agustina dan tamu kehormatan lainnya



Ribuan umat Khonghucu hadir perayaan Imlek Nasional.

Pokja Identitas Hukum Gelar Seminar Peran Pelayanan Adminduk dan Data Kependudukan dalam Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum) menyelenggarakan seminar berjudul "Peran Pelayanan Adminduk dan Data Kependudukan dalam Pemilu 2024".

Seminar ini dilangsungkan Selasa (6/2) di Hotel Ashley, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Tujuan seminar adalah untuk pembelajaran penggunaan data kependudukan dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk penguatan sistem demokrasi dan layanan administrasi kependudukan.

Materi disampaikan oleh Nurul Amalia Salabi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Dr. Handayani Ningrum dari Dirjen Dukcapil dan Eddy Setiawan dari IKI (Insitut Kewarganegaraan Indonesia).

Perludem menjelaskan terkait Optimalisasi Penggunaan Data Kependudukan dalam Proses Pemilu 2024. Sebagaimana ditekan dalam monitoring Perludem, permasalahan utama terletak pada sektor DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu).

Data kependudukan yang akurat adalah kunci dari tidak adanya eksklusi kelompok tertentu dan tidak boleh ada diskriminasi dalam regulasi. Terdapat setidaknya 4% masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih diantaranya adalah transgender karena tidak membawa atau tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), disabilitas mental, masyarakat adat seperti yang tinggal dalam konserfasi hutan.

Berdasarkan data Dukcapil, jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan NIK berjumlah 204,656,053 per Desember 2022. Dukcapil telah melakukan 'jemput bola' kepada penduduk terkait pencatatan dan pembaharuan data. Masih terdapat permasalahan di lapangan karena masyarakat tidak melaporkan peristiwa penting yang dialami oleh dirinya atau keluarganya, terlebih yang dialami oleh penduduk rentan adminduk yaitu kaum marjinal atau miskin ekstrem, ODGJ, narapidana, dis-



Para pembicara dan panitia seminar

abilitas, dan transgender. Terdapat dua dimensi kewarganegaraan yakni status hukum dan praktik kewarganegaraan. Pencatatan sipil masuk dalam dimensi status hukum sebagai hak masyarakat Indonesia. IKI menyoroti bahwa akan lebih efektif jika berbagai peristiwa kependudukan bisa dengan sistem otomatis teridentifikasi dan dilaporkan ke dukcapil. Disarankan sistem nasional ini menanggapi beberapa kekhawatiran terkait pencatatan sipil diluar 6 kategori disabilitas yang sebelumnya di-

sampaikan, seperti warga negara asing (WNA) yang mendapatkan hak pilih. Beberapa permasalahan yang masih terjadi di lapangan, seperti: - Pelayanan 'jemput bola' yang masih terfokus di kota besar dan sosialisasinya belum sampai menyentuh petugas di lapangan; - Terdapat petugas setempat menganggap disabilitas, terutama perempuan dengan disabilitas intelektual, menyatakan tidak perlu memilih dalam Pemilu karena 'belum dewasa' secara usia mental; - Pencatatan juga fokus pada

panti-panti tertentu, sehingga disabilitas dalam panti tersebut tercatat dalam KK panti; - Kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak dari pernikahan siri, kebingungan terkait pengurusan KTP, dan status masyarakat yang hidup berpindah-pindah; - Di area terpencil, masih banyak petugas yang belum paham siapa saja yang termasuk dalam masyarakat disabilitas; - Ketidaksinkronan data antar Kementerian dengan data dukcapil yang menyebabkan terjadi celah seperti terjadinya pemalsuan akta kematian; - Pengurusan dokumen kependudukan yang masih dikhawatirkan oleh masyarakat transgender, yang menjadi pemulung, tinggal di jalanan, dan orang yang baru keluar dari rumah tahanan yang tidak memiliki dokumen karena satu dan lain hal; - Anak Dwi Kewarganegaraan Terbatas yang berulangkahan dalam rentang satu bulan sebelum

pemilihan umum 2024 dan ingin memilih, tidak dapat memilih karena kartu identitas anaknya masih berwarna pink meskipun sudah lewat 17 tahun; - WNA yang naturalisasi dibulan Oktober 2023 masih ada yang tidak bisa memilih di pemilu 2024; Rekomendasi: 1. Perlu ada undang-undang baru terkait kependudukan dan pencatatan sipil, yang mencakup penguatan jaminan HAM dan penyelenggaraan layanan dalam bentuk sistem aktif oleh pemerintah; 2. Terkait Pemilu, perlunya ada surat suara braille, serta layanan pembuatan Kartu Keluarga dan e-KTP bagi penduduk yang berhak memilih namun belum memiliki NIK; 3. Pembentukan data nasional disabilitas yang nantinya akan diberikan kartu penyandang disabilitas dan dengan melibatkan penyandang disabilitas sejak proses perencanaan; 4. Perlu sistem pelaporan yang terintegrasi dan inklusif terkait pencatatan peristiwa penting kependudukan. • Kris